

# LATAR BELAKANG PENGUNDURAN DIRI JEPANG DARI *INTERNATIONAL WHALING COMMISSION* TAHUN 2018

Yolanda Marta Kartika  
Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Airlangga

## Abstrak

Sebagaimana diketahui bahwa semasa keanggotaannya dalam IWC, Jepang telah mendapatkan *special permit for scientific whaling* yang mengizinkan Jepang melakukan perburuan paus guna penelitian ilmiah. Jepang berhasil melaksanakan enam program *scientific whaling*, yaitu JARPA, JARPN, JARPN II, JARPA II, NEWREP-A, dan NEWREP-NP. Dengan menggunakan teori konstruktivisme dan teori legitimasi, penelitian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang pengunduran diri Jepang dari IWC pada 28 Desember 2018. Dalam penelitian ini penulis meletakkan dua hipotesis yaitu Jepang ingin mempertahankan perburuan paus sebagai nilai budaya dan adanya pihak dari politik domestik Jepang dari negara-negara anti perburuan paus dalam IWC. Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif, dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Terdapat dua hasil utama dalam penelitian ini yaitu pengunduran diri Jepang dari IWC terjadi karena masyarakat Jepang ingin mempertahankan perburuan paus sebagai salah satu nilai budaya dan adanya dorongan dari pihak domestik untuk lepas dari tekanan dan standar ganda negara-negara anti perburuan paus dalam IWC.

Kata kunci: *domestik politik, identitas, Jepang, scientific whaling, tekanan internasional.*

## Pendahuluan

Pada tahun 1951 Jepang bergabung dalam IWC (International Whaling Commission, n.d) dengan tujuan utama konservasi dan pemanfaatan paus secara berkelanjutan di alam. IWC merupakan sebuah organisasi yang didirikan sebagai pengimplementasian dari ICRW (The Institute of Cetacean Research, n.d). Dijelaskan dalam website resmi IWC, pada awal pembentukannya, tujuan utama dari IWC adalah sebagai organisasi yang mengatur ketertiban pemanfaatan paus secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah paus di alam (International Whaling Commission, n.d). Dengan keterlibatan Jepang sebagai anggota IWC, menandakan bahwa meskipun perburuan paus telah menjadi sebuah aktifitas umum bagi Jepang, namun Jepang memiliki perhatian tersendiri mengenai pemanfaatan berkelanjutan dan keseimbangan jumlah paus di alam.

Sebagai implementasi dari ICRW, IWC tetap pada tujuan utamanya, hingga pada 1972 terjadi polarisasi yang cukup kuat antara negara-negara anti perburuan paus dengan pro perburuan paus. Negara-negara anti perburuan paus menyusun strategi agar memiliki jumlah suara yang tinggi. Hingga pada tahun 1982, terdapat 25 negara anti perburuan paus bergabung dalam IWC dan kelompok perburuan paus berhasil mencapai suara mayoritas yaitu 75% untuk mulai menerbitkan moratorium perburuan paus (MAFF, n.d: 2). Tepat pada tahun 1982 IWC mengubah haluannya menjadi organisasi yang melaksanakan larangan perburuan paus

dengan moratorium perburuan paus yang diterbitkan atas dorongan negara-negara anti perburuan paus yang telah memperoleh suara mayoritas pada tahun 1982 (Hirata, 2005: 5).

Moratorium perburuan paus mulai diterapkan pada periode tahun 1985/1986. Atas diterbitkannya moratorium tersebut, negara-negara pro perburuan paus termasuk Jepang menyatakan penolakannya. Penolakan tersebut berdampak pada munculnya respon dari negara-negara anti perburuan paus, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya. Berkaitan dengan penolakan Jepang atas moratorium IWC, pada tahun 1987 atas dasar artikel VIII dalam ICRW, Jepang melalui ICR atau *Institute of Cetacean Research* mengajukan proposal rencana *scientific whaling* atau perburuan paus guna penelitian ilmiah kepada komite ilmiah dalam IWC. Rencana penelitian tersebut diajukan Jepang agar IWC dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan dalam IWC.

*Scientific whaling* pertama yang dilakukan oleh Jepang ini dikenal dengan nama *Japanese Antarctic Research Program* atau JARPA yang dimulai sejak periode 1987/1988 dan diberi izin selama 18 tahun pelaksanaan program (The Institute of Cetacean Research, n.d). Tidak berhenti di pada program JARPA saja, pada tahun 1994, Jepang kembali mengajukan perluasan penelitian ilmiah yang mencakup Perairan Pasifik area utara dengan tambahan kuota perburuan paus Minke sebesar 100 ekor dalam setiap tahun. Permohonan tersebut dikabulkan oleh IWC dan program ini dikenal sebagai *Japanese Research Whaling Program in North Atlantic* atau JARPN dan dilaksanakan selama tahun 1994 hingga 1999 (The Institute of Cetacean Research, n.d).

Pada tahun 2000, Jepang kembali mengajukan permohonan tambahan spesies perburuan paus yang kemudian dikenal sebagai *Japanese Research Whaling Program in North Atlantic II* atau JARPN II dengan permohonan penambahan jumlah spesies dalam perburuan paus. Jika pada periode JARPA dan JARPN, Jepang hanya diperbolehkan untuk memburu paus Minke, namun pada JARPN II Jepang mendapatkan izin untuk memburu spesies paus Bryde dan paus Sperm. Selanjutnya, pada tahun 2002 Jepang kembali mendapat izin untuk melakukan perburuan 50 paus Minke dan paus Sei dalam setiap tahun. Hingga tahun 2002 ini, tercatat spesies paus Minke, paus Bryde, paus Sperm, dan paus Sei yang menjadi target perburuan selama program JARPA hingga JARPN II (Hirata, 2005: 9).

Pada tahun 2005, berdasarkan hasil dari JARPA, Jepang memulai kembali program *scientific whaling* yang bernama *Japanese Antarctic Research Program II* atau JARPA II. Program JARPA II ini merupakan signifikansi dari program JARPA dengan tambahan spesies perburuan paus yaitu sebanyak 50 paus Fin dan 50 paus Humpback dalam setiap tahun (The Institute of Cetacean Research, n.d). Pada November 2014, Jepang mengajukan rencana penelitian ilmiah yang disebut NEWREP-A kepada IWC sebagai ganti dari JARPA II. NEWREP-A dilakukan pada Perairan Antartika dengan target yaitu memburu sebanyak 333 paus Minke yang terdiri dari 103 paus Minke jantan dan 230 paus Minke betina setiap tahun. Kemudian pada tahun 2017, Jepang kembali mengajukan rencana penelitian ilmiah yang baru kepada Komite Penelitian IWC yang bernama NEWREP-NP yang menggantikan JARPN II (Japan Whaling Association, n.d).

Terhitung sejak penolakan Jepang atas penerbitan moratorium oleh IWC hingga tahun 2017, Jepang telah menerima *special permit for scientific whaling* sebagai sebuah tiket bagi Jepang untuk melakukan perburuan paus dengan tujuan penelitian ilmiah di berbagai perairan. Tepat pada bulan Juni 2017, pemerintah Jepang telah melaksanakan program JARPA, JARPN, JARPN II, JARPA II, NEWREP-A, dan NEWREP-NP di bawah payung *special permit for*

*scientific whaling*. Namun adanya izin khusus atas *scientific whaling* tersebut ternyata tidak membuat Jepang tetap bertahan pada keanggotaannya dalam IWC. Tepat pada 28 Desember 2018 Jepang mengumumkan pengunduran dirinya dari IWC dan menyatakan akan melakukan melanjutkan perburuan paus secara komersil pada tahun 2019 di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif perairan Jepang.

## Metodologi Penelitian

### Teori Konstruktivisme

Teori Hubungan Internasional yang paling sesuai untuk menganalisis latar belakang pengunduran diri Jepang dari IWC pada tahun 2018 adalah konstruktivisme. Menurut Jackson dan Sorensen (2014: 365), konstruktivisme menyatakan bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, yang hukum-hukum dasarnya tidak dapat dijelaskan menggunakan penelitian ilmiah seperti yang dijunjung oleh kaum behaviouralisme, melainkan dunia sosial adalah sesuatu yang intersubjektif. Konstruktivisme merupakan teori yang mengutamakan nilai, norma, dan kepercayaan. Teori konstruktivisme melihat bahwa sistem internasional tidak ada dengan sendirinya. Namun sistem sosial dibentuk atas kesadaran intersubjektif di antara individu-individu dalam sebuah kelompok, sehingga sistem internasional muncul karena dibentuk oleh gagasan, bukan oleh kekuatan material.

Menurut Weber dalam Jackson dan Sorensen (2014: 369), untuk memahami interaksi atau norma yang dilakukan oleh manusia, kita tidak bisa hanya menggambarkannya dengan cara kita menggambarkan fenomena fisik yang kita lihat, melainkan dibutuhkan adanya *verstehen* atau pemahaman intepratif untuk memahami makna di balik sebuah aksi yang dilakukan. Konsep *verstehen* ini dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah makna nilai yang dianut oleh Jepang dibalik aksi perburuan paus yang dilakukan oleh masyarakat Jepang.

Martha Finnemore dalam Jackson Sorensen (2014: 383) berpendapat bahwa norma-norma internasional yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi internasional mampu mempengaruhi dan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma tersebut dalam kebijakan nasional mereka.

### Teori Legitimasi Domestik

Legitimasi merupakan sebuah persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah tepat dan sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995: 574). Mendukung teori legitimasi dari Suchman, Dowling dan Pfeffer (1975: 122) menyatakan bahwa legitimasi dalam sebuah organisasi adalah suatu kondisi ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial di mana entitas tersebut berada. Ketika adanya perbedaan terhadap potensi atau nilai yang masuk ke dalam kedua sistem nilai tersebut, maka hal tersebut merupakan ancaman bagi legitimasi. Dalam menjelaskan posisi Jepang sebagai negara pro perburuan paus dalam keanggotaannya dalam IWC, teori legitimasi menjelaskan bahwa adanya perburuan paus merupakan sebuah kepercayaan domestik dalam masyarakat Jepang mengenai dan aktifitas perburuan paus bukan sebuah pelanggaran aturan.

Dalam kaitannya dengan hubungan IWC dan Jepang sebagai negara pro perburuan paus, teori legitimasi ini mampu menjelaskan bahwa norma anti perburuan paus yang dijunjung tinggi oleh IWC beserta mayoritas anggotanya ternyata tidak kongruen dengan norma yang diyakini dan berlaku dalam masyarakat Jepang sehingga masyarakat lokal di Jepang seolah tidak menghiraukan sanksi maupun kritik dari negara anti perburuan paus dan tetap pada posisinya untuk melakukan perburuan paus dalam keanggotaan Jepang di IWC.

## Pembahasan

### **Perburuan Paus Merupakan Bentuk Pengaplikasian Budaya Jepang**

Bagi masyarakat Jepang, aktifitas perburuan paus memiliki nilai budaya tersendiri. Pemerintah Jepang dalam tulisan yang berjudul *The Japanese Government's position on whaling* yang diterbitkan dalam website resmi Kedutaan Besar Jepang di Selandia Baru (*The Japanese Government's Position on Whaling*, n.d: 3) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang mendalam antara Jepang dengan paus sebagai makhluk hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bukti sejarah berupa dari zaman batu, karya seni, prasasti, dan monumen yang menggambarkan pentingnya paus bagi masyarakat Jepang. Selain itu, ada dasar pengaruh kepercayaan Shinto yang kuat dalam masyarakat Jepang, pada zaman dahulu kala mereka meyakini bahwa paus merupakan manifestasi dari Dewa Ebisu, yaitu dewa yang membawa kekayaan dari laut. Melalui makanan, karya tulis, dan kesenian daerah, dapat dilihat bahwa perburuan paus merupakan sebuah aktifitas dalam pengaplikasian budaya Jepang yang telah dijalankan secara turun temurun.

### **Makanan**

Bagi masyarakat Jepang, mengkonsumsi daging paus bukanlah sebuah hal yang tabu dan merupakan bagian dari budaya. Dalam jurnal resmi milik pemerintah Jepang yang diterbitkan dalam website resmi *The Japanese Government's Position on Whaling* (n.d: 3) menyatakan bahwa konsumsi daging paus berkaitan dengan awal masa penyebaran agama Budha di Jepang. Dalam penyebarannya, terdapat aturan-aturan seperti larangan untuk mengkonsumsi daging hewan darat seperti daging sapi dan unggas. Hal tersebut menjadikan masyarakat Jepang bergantung pada makanan laut, salah satunya adalah paus. Selain itu, aktifitas mengkonsumsi daging paus turut didukung oleh kepercayaan Shinto yang melihat bahwa paus melakukan konsumsi pada paus merupakan sebuah rasa syukur atas berkat yang datang. Salah satu kutipan Kalland (2009: 67) bahkan menyamakan budaya mengkonsumsi paus di Jepang dapat disetarakan dengan budaya tidak mengkonsumsi daging sapi dalam Hindu dan tidak mengkonsumsi daging babi dalam Islam. Berikut adalah kutipan dari Kalland:

*...unlike in traditional totemic societies – as found among the aborigines in Australia and Indians in North America, where prohibitions extend only to the group with that particular totem – and unlike the Hindus, who in no way try to impose the prohibitions of killing and eating cows on the rest of Mankind ....*

### **Seni dan Karya Tulis**

Sejarah panjang Jepang dan aktifitas perburuan paus juga dapat dilihat dari beberapa bukti sejarah berupa karya seni dan karya sastra. Contoh karya seni yang menunjukkan bahwa aktifitas perburuan paus telah menjadi budaya turun temurun dalam masyarakat Jepang adalah monumen Wada Yorimoto di dalam kuil Junshin di kota Taiji (lihat peta). Monumen tersebut merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada Wada Yorimoto yang telah menemukan metode kuno dalam perburuan paus (Kumanonada Nihonisan, n.d).

Selain itu, di wilayah Taiji terdapat tarian tradisional yang bernama *Kujira Odori* yang menggambarkan heroisme dalam perburuan paus. Tarian ini telah menjadi salah satu properti budaya Prefektur Wakayama (Kumanonada Nihonisan, n.d). Kemudian, sejarah perburuan paus dapat dilihat dari karya sastra kuno Jepang yang berjudul *Manyoshu*, yaitu sebuah puisi yang menceritakan tentang penangkapan ikan pemberani dan novel klasik Jepang berlatarkan

zaman Edo berjudul *Toukaidohchu Hizakurige* yang menceritakan kesenangan dua pelancong dalam menikmati daging paus (The Japanese Government's Position on Whaling, n.d: 3).

### **Kesenian Daerah**

Di hampir seluruh wilayah Jepang, terdapat kesenian yang berhubungan dengan aktifitas perburuan paus. Kesenian daerah tersebut dituangkan dalam bentuk lagu daerah, tarian daerah, hingga ritual. Beberapa kesenian daerah yang terkemuka adalah *Miwasaki Whale Dance* (Greenland, 2012: 100), dan Ritual Mifune dalam Festival Kochi di Wakayama (Kumanonada Nihonisan, n.d). Kedua ritual tersebut menceritakan tentang kehidupan masyarakat Jepang yang berdampingan dengan paus. Wakayama merupakan salah satu wilayah di Jepang yang menjadikan kesenian daerah mengenai perburuan paus sebagai salah satu sarana promosi pariwisata. Berikut adalah daftar kesenian daerah di berbagai wilayah Jepang yang berkaitan dengan aktifitas perburuan paus.

### **Whaling Towns Sebagai Bukti Perburuan Paus Sebagai Identitas Jepang**

Sebagaimana diketahui bahwa aktifitas perburuan paus telah dilakukan oleh masyarakat Jepang sejak zaman pre modern, maka sejarah panjang dalam perburuan paus tersebut kemudian melahirkan komunitas-komunitas pemburu paus lokal yang menjadikan aktifitas perburuan paus sebagai identitas mereka. Komunitas-komunitas pemburu paus lokal tersebut masih melakukan praktik perburuan paus secara turun temurun dan keberadaannya dapat ditemukan di empat kota utama di Jepang yang disebut dengan *whaling towns*. Kota-kota tersebut adalah Taiji, Wadoura, Ayukawan, dan Abashiri (Holm, 2019: 4). Ke empat *whaling towns* tersebut berada di pesisir perairan Jepang dan tidak hanya berisikan komunitas-komunitas lokal pemburu paus namun juga sebagai tempat beradanya situs-situs sejarah yang berkaitan dengan perburuan paus (Segi, 2003: 22).

### **Pemenuhan Kepentingan Nasional Jepang**

Perburuan paus merupakan kepentingan nasional Jepang tidak hanya dalam bidang budaya namun juga dalam bidang keamanan pangan. Menurut World Food Summit 1996 dalam Policy Brief FAO (2006: 1), keamanan pangan terjadi ketika seluruh masyarakat dalam sebuah kelompok dalam waktu yang bersamaan memiliki cukup akses secara fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan kemampuan mereka untuk mencapai kehidupan sehat.

Hingga tahun 1960-an konsumsi daging paus di Jepang mencapai 154.000 ton per tahun, dan pada tahun 1970 mencapai angka 200.000 ton per tahun. Namun pada tahun 1980-an pasca penerbitan moratorium larangan perburuan paus, jumlah konsumsi daging paus menjadi turun drastis hingga hanya mencapai angka puluhan ribu ton per tahun (Nippon News, 2019). Hal tersebut diakibatkan langkanya aktifitas jual beli daging paus baik di pasar tradisional hingga restoran-restoran di hampir seluruh wilayah Jepang. Hingga tahun 2000-an, sumber protein yang awalnya berasal dari daging paus mulai tergantikan dengan daging ayam, daging sapi, dan daging babi. Adanya larangan perburuan paus mengakibatkan pergeseran dalam pemenuhan kebutuhan pangan beserta budaya masyarakat Jepang dalam menyantap daging paus. Hal tersebut juga turut mempengaruhi pemberdayaan dan tingkat ekonomi komunitas-komunitas pemburu paus.

### **Tingginya *Gaiatsu* (Tekanan Internasional) Pada Jepang**

Keputusan Jepang sebagai negara pro perburuan paus untuk mengajukan proposal scientific whaling untuk pada akhirnya menaati moratorium perburuan paus yang diaplikasikan mulai periode 1985/1986 dan mengajukan proposal *scientific whaling* tidak terlepas dari adanya *gaiatsu* atau tekanan internasional yang diterima Jepang sebagai salah satu negara anggota

pro perburuan paus dalam IWC (Burgess, 2016: 1). Kedudukan Amerika Serikat yang strategis dalam IWC sebagai perancang moratorium perburuan paus menjadikannya sangat vokal dalam memberikan kritik hingga ancaman kepada Jepang.

### **Ancaman Amerika Serikat Menggunakan *Packwood Magnuson Amendment***

Salah satu bentuk ancaman yang diterima oleh Jepang selama masa keanggotaannya dalam IWC adalah ancaman ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat yang berlandaskan *Packwood Magnuson Amendment to the Magnuson Fishery Conservation and Management Act* dan *Pelly Amendment*. Pada tahun 1954, pemerintah Amerika Serikat mengesahkan UU Perlindungan Nelayan yang juga dikenal sebagai *Pelly Amendment* (Rebmann, 2015: 73). *Pelly Amendment* menyoalakan mengenai embargo total atau sebagian atas pengiriman produk perikanan dari negara-negara yang melanggar (Alexander, 2013: 9).

### **Gugatan Australia Atas Jepang di ICJ**

Selama periode JARPA hingga JARPA II, Jepang tidak luput dari kecaman. Salah satu negara anggota IWC yang paling vokal membicarakan hal ini adalah Australia dan Selandia Baru. *Scientific whaling* yang berhasil dilakukan Jepang pasca diterbitkannya moratorium perburuan paus membuat Australia geram. Hingga pada 31 Mei 2010, Australia mengajukan gugatan kepada ICJ atas tuduhan bahwa *scientific whaling* yang selama ini dilakukan oleh Jepang ternyata tidak digunakan sebagai tujuan penelitian melainkan hanya digunakan sebagai upaya penyamaran atas perburuan paus komersial (Rebmann, 2016: 65). Pada tahun 2014, ICJ pada akhirnya memberi penangguhan penerbitan *special permit for scientific whaling* JARPA II kepada Jepang.

### **Dukungan Pemerintah Jepang atas Perburuan Paus**

Pemerintah Jepang sebagai kekuatan besar dalam domestik politik Jepang memiliki andil besar dalam perburuan paus yang tetap dilakukan khususnya oleh komunitas lokal di daerah pesisir pantai di tengah keanggotaan Jepang dalam IWC. Dalam Holm (2019: 6) dijelaskan bahwa sesaat setelah Jepang secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari IWC, para kongres yang mayoritas berasal dari Partai Liberal Demokratik Jepang merencanakan pertemuan santai di kafetaria markas partai dengan menyajikan ikan paus goreng sebagai menu utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa perburuan paus yang tetap terjadi di Jepang karena adanya dukungan kuat dari para aktor dalam pemerintahan Jepang dan keluarnya Jepang dari IWC merupakan sebuah momentum yang telah dinantikan.

### **Dukungan Media Domestik dalam Perburuan Paus**

Kemudian, media domestik Jepang juga memiliki peran yang besar dalam perburuan paus. Karena dukungan domestik politik Jepang yang sangat kuat akan perburuan paus, maka media pun sulit untuk meliput gerakan-gerakan anti perburuan paus, ditambah lagi tidak adanya debat umum yang signifikan mengenai isu anti perburuan paus (Danaher 2002, dalam Catalinac dan Chan, 2005: 147). Sebagaimana teori dalam media yang mengatakan bahwa media secara umum akan konsisten dengan nilai-nilai dan peraturan dalam sebuah masyarakat (McQuail, 1983), isu-isu mengenai anti perburuan paus menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk diangkat oleh media domestik Jepang. Beberapa kelompok lingkungan transnasional seperti Greenpeace, WWF, dan *Friends of the Earth* juga menemukan masalah berkaitan dukungan anti perburuan paus di Jepang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya simpati media terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anti perburuan paus.

### **Standar Ganda Dalam IWC**

Standar ganda yang ada dalam IWC bermula dari negara-negara anti perburuan paus yang memiliki perlakuan dan penilaian berbeda antara norma yang berlaku di Jepang dengan norma yang berlaku secara domestik di negara mereka. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui *Aboriginal Subsistence Whaling* yang dilakukan oleh negara-negara anti perburuan paus dalam IWC dan perburuan hewan langka oleh Australia.

### ***Aboriginal Subsistence Whaling* oleh Negara-Negara Anti Perburuan Paus**

*Aboriginal Subsistence Whaling* ditunjukan karena adanya aspek budaya tradisional dalam sebuah komunitas asli yang menempati negara yang tergabung dalam IWC. Terdapat empat negara anggota dalam IWC yang memiliki *special permit* dalam *Aboriginal Subsistence Whaling* ini, yaitu Denmark (Greenland), Rusia (Chukotka), St. Vincent and the Grenadines (Bequia), dan Amerika Serikat (International Whaling Commission, n.d). Kemudian, *Whaling Under Objection* dilakukan oleh Norwegia dan Islandia sebagai negara yang menolak moratorium perburuan paus. Sebagai salah satu negara yang paling keras memberikan kritik dan ancaman atas *scientific whaling* yang dilakukan Jepang, Amerika Serikat pada kenyataannya menggunakan *special permit* perburuan paus di bawah program *Aboriginal Subsistence Whaling* atas nama budaya tradisional Suku Inuit di Alaska.

### **Standar Ganda oleh Australia mengenai Perburuan Mamalia**

Dengan adanya persamaan latar belakang atas perburuan mamalia oleh Australia dan Jepang tersebut, Australia justru menentang aktifitas perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang. Dari penjabaran mengenai sejarah perburuan kanguru yang bermula dari Suku Aborigin sebagai suku asli di Australia hingga saat ini, maka terdapat sebuah hubungan kebudayaan yang menjadi dasar dari aktifitas perburuan baik kanguru maupun paus. Namun dengan adanya kritik hingga gugatan oleh Australia atas perburuan paus sangat disayangkan oleh Jepang sehingga memantik pihak Jepang melalui Yoshimada Hayashi untuk mengeluarkan pernyataan demikian:

*We have never said everybody should eat whale, but we have long tradition and culture of whaling. So, why don't we at least agree to disagree? We have this culture and you don't have that culture. In some countries they eat dogs, like Korea. In Australia they eat kangaroos. We don't eat those animals, but we don't stop them from doing that because we understand that's their culture ...* (ABC News, 2013).

Adanya standar ganda mengenai perburuan mamalia oleh Australia tersebut menunjukkan bahwa imperialisme budaya adalah nyata, yang mana nilai-nilai Barat yang dianggap benar harus diaplikasikan secara menyeluruh dalam sebuah sistem sosial di dunia ini. Adanya pemahaman bahwa budaya perburuan paus oleh Jepang adalah sebuah anomali oleh negara-negara anti perburuan paus dalam IWC kemudian mendorong Jepang untuk terbebas dari IWC.

### **Kesimpulan**

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan dua teori yaitu teori konstruktivisme dan teori legitimasi.

Teori konstruktivisme mampu menjelaskan bahwa aktifitas perburuan paus merupakan sebuah nilai atau norma yang diyakini, berkembang, dan dilaksanakan dalam masyarakat Jepang sebagai hasil dari kesadaran intersubjektif di antara individu-individu dalam sebuah kelompok masyarakat Jepang dan telah dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Adanya

nilai atau norma yang diyakini dalam sebuah kelompok masyarakat akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.

Teori legitimasi mampu menjelaskan bahwa perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang merupakan sebuah tindakan yang memiliki dasar dan dinilai tepat dan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku sah secara domestik. Dalam teori legitimasi, terdapat faktor-faktor yang membuat sebuah kelompok mampu menaati peraturan. Penulis menemukan bahwa aktor-aktor dalam pemerintahan Jepang memiliki peran penting dalam aktifitas perburuan paus yang tetap dilakukan oleh masyarakat Jepang. Selain atas dasar budaya, perburuan paus di Jepang juga tetap dilakukan karena merupakan sebuah aktifitas yang sah secara hukum domestik dan adanya dorongan dari pihak domestik politik Jepang, seperti Kabinet, Partai Liberal Demokratik, Badan Perikanan Jepang, dan organisasi domestik pro perburuan paus.

Keputusan Jepang untuk mengundurkan diri dari IWC pada tahun 2018 dan memutuskan untuk melanjutkan perburuan paus dalam wilayah ZEE Jepang merupakan sebuah keputusan yang didasari oleh identitas dan jati diri bangsa. Perburuan paus merupakan sebuah aktifitas yang telah dilakukan selama ribuan tahun dan secara turun-temurun. Jepang yang menyadari akan pentingnya keseimbangan paus di alam pun memutuskan untuk bergabung dalam IWC pada tahun 1951. Pergeseran tujuan dalam IWC pasca moratorium dengan suara mayoritas berasal dari negara-negara anti perburuan paus, hal tersebut membawa tekanan bagi Jepang. Nilai-nilai Barat yang menganggap bahwa melakukan perburuan paus adalah hal tabu telah mendominasi IWC. Keluarnya Jepang IWC merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh aktor-aktor pemerintahan sebagai bentuk konkret dari dorongan pihak domestik Jepang kepada masyarakat Jepang untuk tetap melestarikan identitas bangsa baik melalui aktifitas perburuan paus atau pengonsumsian daging paus dengan bebas tanpa tekanan dan tanpa pengaruh imperialisme budaya Barat.

## Referensi

- 2002 Meeting: Final Press Release from The International Whaling Commission's 54th annual meeting in Shimonoseki, Japan 2002. (2002). Diambil pada 17 Mei 2019, dari <https://iwc.int/meeting2002>
- Agriculture, Fisheries, and Forest. (2019). Diambil pada 17 April 2019, dari <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fishery/whales/japan.html>
- Akamine, J. (2013). *Intangible Food Heritage: Dynamics of Whale Meat Foodways in an Age of Whale Meat Rarity*. Nagoya City University.
- Alexander, K. (2013). The International Whaling Convention (IWC) and Legal Issues Related to Aboriginal Rights. *Congressional Research Service: Informing the Legislative Debate Since 1914*, 1-18. Diambil pada 22 Mei 2019, dari <https://fas.org/sgp/crs/row/R40571.pdf>.
- Alexandrov, M. (2003). *The Concept of State Identity in International Relations : A Theoretical Analysis*. *Journal of International Development and Cooperation*, 10(1), 33-36. doi:10.15027/14409
- Bjorkdahl, A. (2002). *Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections*. *Cambridge Review of International Affairs*, 15(1), 9-23. doi:10.1080/09557570220126216
- Burgess, C. (2016). *Killing the Practice of Whale Hunting is the same as Killing the Japanese People: Identity, National Pride, and Nationalism in Japan's Resistance to International Pressure to Curb Whaling*. *The Asia-Pacific Journal*, 14(8), 2nd ser., 1-18. doi:<https://apjif.org/-Chris-Burgess/4881/article.pdf>
- Catalinac, A. L., & Chan, G. (2005). *Japan, the West, and the whaling issue: Understanding the Japanese side*. *Japan Forum*, 17(1), 133-163. doi:10.1080/0955580052000337512
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). *Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour*. *JSTOR*, 122-136. doi:10.2307/1388226
- Fearon, James D. (1998). *Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations*. University of Chicago.
- Fitzmaurice, Malgosia. (2015). *Whaling and International Law*. Cambridge University Press.
- Fukumoto, K. (1960). *Nihon hogeishi-wa (History of Japanese Whaling)*. Tōkyō: Hosei University Press.
- Greenland, F. (2012). *Whaling Songs in Japan as a Reflection of Cultural Attitudes*. Bukkyo University.
- Hirata, K. (2014). *Why Japan Supports Whaling*. *Journal of International Wildlife Law & Policy*, 8:2-3, 129-149. doi:10.1080/13880290590965276
- History of Whaling. (n.d.). Diambil pada 25 Februari 2019, dari <http://whaling.jp/>
- Holm, F. (2019). After Withdrawal from the IWC: The Future of Japanese Whaling. *The Asia-Pacific Journal*, 17(4), 4nd ser., 1-16.
- Hurd, I. (1999). *Legitimacy and Authority in International Politics*. *SPRING*, 379-408. Diambil dari March 10, 2019.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Japan and Management of Whales. (2019). Diambil pada 17 Mei 2019, dari <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fishery/whales/japan.html>
- Japan Whaling Association (n.d.). History of Whaling. Diambil pada 12 Mei 2019, dari <https://www.whaling.jp/english/history.html>
- Kalland, A. (2009). *Unveiling The Whale: Discourses on Whales and Whaling*. New York: Berghan Books.

- Mcgee, R.W. (2007). *Economic Sanctions and International Relations*. Fayetteville State University. Retrieved June 17, 2019.
- Mikail, E. H., & Aytakin, C. E. (2016). *Identity in Security Studies*. Open Journal of Political Science, 339-344. doi:10.4236/ojps.2016.64030
- Policy Brief: Food Security. (2006). Diambil pada 17 Juni 2019, dari [http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitally/documents/pdf/pdf\\_Food\\_Security\\_Concept\\_Note.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitally/documents/pdf/pdf_Food_Security_Concept_Note.pdf)
- Rebmann, S. K. (2016). *Japanese Whaling and the International Community: Enforcing the International Court of Justice and Halting NEWREP-A* (Vol. 5). University of Arizona.
- Rousseau, D. L. (2007). *Identity, Power, and Threat Perception: A Cross-National Experimental Study*. Journal of Conflict Resolution, 51, 5th ser., 744-771. Retrieved June 17, 2019.
- Segi, S. (2003). *The Coexistence of Whaling and Whale Watching in Tradition whlaing Region: The Case of Taiji, Wakayama Prefecture, Japan*. SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin, 15, 21-25.
- Sieg, L & Takenaka, K. (2018, Desember 26). *Japan to Resume Commercial Whaling After Pulling Out of IWC*. Diambil pada 11 Juni 2019, dari <https://www.reuters.com/article/us-japan-whaling/japan-to-resume-commercial-whaling-after-pulling-out-of-iwc-idUSKCN1OP03O>
- Suchman, M. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. Academy of Management Review, 20(3), 571-610.
- Takahashi, J., Kalland, A., Moeran, B., & Bestore, T. C. (1989). *Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities* (2nd ed., Vol. 2). Amsterdam: Maritime Anthropological Studies.
- Whale and Dolphin Conservation. (n.d). Diambil pada 17 Mei 2019, dari <https://uk.whales.org/>
- Whale Meat No Longer Protein Source in Japan. (2019) Diambil pada 17 Juni 2019, dari <https://www.nippon.com/en/features/h00361/whale-meat-no-longer-a-major-protein-source-in-japan.html>